

GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA : STUDI KASUS GERAKAN MAHASISWA TAHUN 1974

Gili Argenti, S.IP, M.Si

Abstrak

Kemunculan gerakan mahasiswa 1974 menandai berakhirnya masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca gerakan mahasiswa 1966, tuntutan utama gerakan mahasiswa 1974 mengkritik kebijakan pembangunan Orde Baru yang di nilai tergantung bantuan modal dan investasi asing.

A. Pendahuluan

Menurut Adi Suryadi Culla,¹ sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan sebagai generasi patah tumbuh hilang berganti, tentunya kita tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo-sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA-mempelopori perjuangan merebut kemerdekaan melalui jalur organisasi pada tahun 1908, kepeloporannya ini dicatat sebagai pionir serta menjadi titik awal pergantian strategi perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional perlawanan fisik beralih ke bentuk pergerakan organisasi modern. Begitupun ditahun 1920-an, kembali mahasiswa dan pemuda mengukir sejarahnya dengan mendeklarasikan satu kesatuan dalam bingkai keindonesiaan, para pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi kedaerahan, membulatkan tekad dalam ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928 meruntuhkan sekat-sekat primordial mengikat diri menjadi satu kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Begitu juga dengan peristiwa deklarasi kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, tidak lepas dari campur tangan para pemuda dan mahasiswa yang memiliki watak radikal, mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta untuk secepatnya memproklamkan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari tentara sekutu.

Pasca kemerdekaan peran pemuda dan mahasiswa tidak surut, golongan kelas menengah Indonesia ini, senantiasa hadir memenuhi panggilan zamannya, salah satu peran sosial politik mahasiswa yang menonjol pasca kemerdekaan adalah dengan lahirnya generasi mahasiswa angkatan 1966. Menurut Khatimi Bahri,² gerakan mahasiswa 1966 dianggap sebagai agen perubahan sosial dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Ia dianggap mampu mengartikulasi secara tepat apa yang menjadi kegelisahan dan tuntutan rakyat ketika itu, melalui Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) mahasiswa mendapat dukungan luas masyarakat untuk menggerakkan perubahan yang berujung dengan kejatuhan penguasa Orde Lama.

¹Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999). Hal 18-32.

² Khatimi Bahri, *Fase-Fase Gerakan Mahasiswa dalam Fahruz Zaman Fadhy* (editor), *Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 19998*. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999). Hal 56.

Pasca peristiwa 1966, untuk jangka waktu yang cukup lama gerakan mahasiswa tidak menunjukkan gaungnya, antara lain karena pemikiran untuk kembali ke kampus, disamping memberikan kesempatan kepada penguasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk merealisasikan komitmen pembaharuan politik yang dicita-citakan oleh seluruh elemen kekuatan perjuangan angkatan 1966.

Kelahiran Orde Baru tidak lepas dari peran generasi mahasiswa 1966 yang sepenuhnya didukung oleh kalangan militer, khususnya dari Angkatan Darat (AD). Militer saat itu menjadi kekuatan yang menyokong setiap aksi demonstrasi mahasiswa ketika menuntut Tritura, aliansi strategis antara keduanya kemudian mampu menggusur Presiden Soekarno dari singgasana kekuasaannya, untuk kemudian mengangkat Soeharto dengan pemerintahan barunya.

Menurut Eep Saefulloh Fattah,³ konsolidasi awal pemerintahan Orde Baru menjadi masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa, dalam masa tersebut tumbuh harapan besar ditengah mahasiswa bahwa penguasa baru ini akan bersikap akomodatif dan responsif dibandingkan penguasa sebelumnya (Orde Lama). Tetapi masa bulan madu itu kemudian dengan cepat berubah memasuki tahun 1970-an, terutama semenjak tahun 1971. Pada masa itu, mulai bertumbuhan komunitas-komunitas kritis ditengah mahasiswa, sehingga mengakibatkan mulai terbentuk jarak antara kepentingan perubahan yang dicita-citakan mahasiswa dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara dalam meletakkan dasar-dasar modernisasi pembangunan secara cepat.

Kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru ditunjukkan dengan menggelar berbagai aksi demonstrasi di berbagai kampus, klimaks aksi demonstrasi terjadi pada 15 Januari 1974 yang dimotori oleh Dewan Mahasiswa (DM) UI, ketika kedatangan Perdana Menteri (PM) Tanaka, mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran yang berujung aksi huru-hara yang membakar kota Jakarta. Perlawanan mahasiswa mencapai puncaknya pada peristiwa malari.

Menurut Hariman Siregar, gerakan mahasiswa angkatan 1974 yang berujung huru-hara tersebut, berangkat dari keperihatinan akan situasi kehidupan berbangsa bernegara saat itu, sehingga mahasiswa memutuskan untuk bergerak mengingatkan pemerintah atas strategi kebijakan pembangunan yang diambil. ada beberapa alasan mengapa mahasiswa Indonesia memutuskan untuk bangkit melawan : (1) strategi pembangunan Orde Baru mengakibatkan hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati hasil pembangunan, mereka paling-paling terdiri dari elit militer, elit birokrasi sipil, pengusaha dan komperador asing, (2) atas nama stabilitas, represi politik di dalam negeri meningkat, hak-hak sipil dan politik warga negara terabaikan, akibatnya semakin sulit bagi rakyat secara politik memperjuangkan hak-haknya, dan (3) ketergantungan pada pihak asing semakin meningkat, negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional dapat dengan mudah memaksakan

³ Eep Saefulloh Fattah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru : Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010). Hal 116-117.

kehendaknya, seperti terlihat dalam tender proyek telekomunikasi dan beberapa paket deregulasi yang disodorkan Bank Dunia.⁴

Dari narasi singkat diatas tentang pergerakan mahasiswa angkatan 1974, menurut penulis kemunculan mereka menjadi suatu yang menarik dan dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Selain kemunculannya di awal-awal konsolidasi rezim Orde Baru, mereka juga tidak didukung oleh militer seperti angkatan 1966. Kemunculan mereka dalam pentas politik nasional menjadikan gerakan mereka sangat fenomenal, disaat seharusnya terjadi bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca keberhasilan mereka meruntuhkan pemerintahan Orde Lama. Studi ini diharapkan akan menjawab asal mula munculnya gerakan mahasiswa 1974, melalui penelitian ini juga penulis ingin mengetahui anatomi gerakannya baik dari isu, ideologi, pola gerakan dan aktor, serta seberapa besar dampak gerakan mereka terhadap arah kebijakan Orde Baru.

B. Perumusan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Bagaimana anatomi gerakan mahasiswa (isu, ideologi, pola gerakan dan aktor) tahun 1974?
2. Bagaimana dampak dari gerakan mahasiswa tahun 1974 terhadap kebijakan politik Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menjelaskan anatomi gerakan mahasiswa (isu, ideologi, pola gerakan dan aktor) tahun 1974.
2. Mengetahui dampak gerakan mahasiswa tahun 1974 terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, penelitian tentang gerakan mahasiswa di Indonesia diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori gerakan sosial dan teori analisa sistem politik di negara Dunia Ketiga.
2. Manfaat praktis, penelitian ini menjadi referensi utama bagi gerakan mahasiswa pasca reformasi bagaimana membangun format gerakan dan merumuskan isu-isu strategis.

E. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini, sebuah metode menganalisis data ditunjukkan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi.

2. Jenis Data.

Data primer, yaitu data yang tersusun dalam bentuk langsung seperti wawancara dari para pelaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

⁴Amir Husain Daulay dan Imran Hasibuan (editor), *Hariman dan Malari : Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. (Jakarta : Q. Communication, 2011). Hal 386.

diteliti.⁵ Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Seperti buku, koran, artikel dan jurnal.⁶

3. Teknik Pengolahan Data.

Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan dalam pengumpulan data baik itu tertulis maupun lisan (wawancara) yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. *Kedua*, menguji dan menganalisa data secara kritis. *Ketiga*, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

F. Kerangka Teori

a) Presfektif Teori Gerakan Sosial.

Menurut Rajendra Singh,⁷ gerakan sosial ialah : (1) Mengekspresikan usaha-usaha kolektif untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial. (2) Memobilisasi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha menyuarakan keluhan melawan pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat.

Kemudian Robert Miesel menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial : (1) Gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. (2) Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. (3) Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan, (4) Bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan dan (5) Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan.⁸

b) Aktor Gerakan Sosial.

Para anggota (aktor) kelompok gerakan sosial diidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak puas dan kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam kehidupan kelompok marginal ditengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat, jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial akan senantiasa melibatkan individu atau sekelompok orang yang terorganisir secara baik dan rapih, untuk melakukan sebuah perubahan yang menyentuh dimensi moral, sosial, politik maupun ekonomi.⁹

⁵ Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996) Hal 45Hal 46.

⁶ *Ibid* Hal 57

⁷ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*. (Yogyakarta : Resit Book, 2010).

⁸ Robert Miesel, *Teori Pergerakan Sosial*. (Yogyakarta : Resist Book, 2004). Hal 56-58.

⁹ Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Menurut Aswab Mahasin,¹⁰ dengan mengutip Eric Wolf, Barrington Moore dan Landsberger, menengarai bahwa gerakan sosial lebih banyak diprakasasi oleh golongan menengah, lebih jauh ia mengatakan gerakan sosial yang digerakan oleh masa kelas bawah hanya sebagai mitos. Golongan kelas menengah bisa berupa kelompok studi, perkumpulan mahasiswa, kelompok kohesif, komunitas pedagang dan kaum buruh perkotaan.

c) Jenis Gerakan Sosial.

Dalam studinya David F Aberle seperti yang dikutip oleh Damsar,¹¹ menjelaskan, bahwa gerakan sosial bersifat reformatif, yakni gerakan untuk mentransformasikan tatanan sosial itu sendiri, para anggotanya memiliki kehendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan yang lebih baik menurut versi mereka.

Menurut Suharko jenis-jenis gerakan sosial diantaranya : (1) gerakan protes, gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. (2) Kedua, gerakan regresif, gerakan yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Dan (3) gerakan religius, gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (*supernatural*), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.¹²

d) Ideologi dan Tema Gerakan Sosial.

Menurut Bagus Takwin, dalam konteks gerakan sosial, ideologi seringkali digunakan sebagai dasar bagi usaha pembebasan manusia, Ideologi memberi arah bagi gerakan, serta menjadi keyakinan bagi kelompok tersebut.¹³ Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua kata, yakni *ideo* artinya pemikiran ; *logis* artika logika, ilmu pengetahuan. Jadi dapat didefinisikan ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita.¹⁴ Ideologi menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikan. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti partai politik atau asosiasi politik.¹⁵ Ciri suatu ideologi adalah cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, bahkan diyakini bersifat universal. Ideologi dirasakan menjadi milik yang mengikat suatu kelompok manusia dalam membenarkan atau mempertahankan perbuatan kelompoknya.

¹⁰ Aswab Mahasin dan Ismed Natrsir, *Cendekiawan dan Politik*. (Jakarta : LP3ES, 1983).

¹¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik (edisi revisi)* (Jakarta : Kencana, 2010) Hal 133-135.

¹² Suharko, *Gerakan Sosial Baru di Indonesia* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1, Juli 2006.

¹³ Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi*. (Yogyakarta : Jalasutra, 2009) Hal 5.

¹⁴ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010).

¹⁵ *Ibid* Hal 238.

e) **Analisa Sistem Politik.**

Menurut Easton sistem politik haruslah mempunyai kemampuan untuk merespon tuntutan-tuntutan dari anggota masyarakat atau warga negaranya dan oleh karena itu dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang mengharuskannya berfungsi, disini Easton menjelaskan bahwa sebuah sistem politik itu terdiri dari sebuah sistem interaksi di dalam suatu masyarakat antara institusi sosial di dalamnya, sehingga dari adanya interaksi tersebut menyebabkan ia dituntut untuk bisa adaptasi terhadap lingkungannya.¹⁶

G. Awal Pemerintahan Orde Baru

1. Kondisi Ekonomi

Tentunya gerakan mahasiswa tahun 1974, tidak dimunculkan dalam ruang yang kosong, ada rangkaian peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang kemunculan kembali gerakan kelas menengah ini, setelah sebelumnya untuk waktu yang lama mahasiswa tidak menunjukkan gaungnya pasca peristiwa 1966. Di bawah ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang seting sosial, politik dan ekonomi yang melatarinya kemunculan kembali gerakan mahasiswa 1974.

Tahun 1966 merupakan masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, proses transisi ini ditandai dengan terjadinya pergeseran pusat perhatian utama pemerintah yang awalnya terfokus dari masalah pembangunan politik ke masalah pembangunan ekonomi, pemerintahan baru dibawah Presiden Soeharto menyadari pelaksanaan pembangunan ekonomi akan terlaksana, apabila ditunjang oleh adanya keamanan stabilitas sosial politik. Perhatian serius untuk menata kembali sistem politik Indonesia di masa Orde Baru sepenuhnya diciptakan untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi, proses penataan ini semakin mendesak dilakukan, karena prioritas kebijakan pemerintah Indonesia ketika itu berorientasi pada bidang pembangunan, dimana proses tersebut harus mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalistik.¹⁷

Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru yang bercorak kapitalis, yaitu membuka masuknya investasi dan bantuan modal asing. Kebijakan investasi asing satu diantaranya dengan cara mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah Orde Baru mengupayakan pemanfaatan hutan-hutan tropis di luar Jawa dan pemanfaatan sumber daya tambang serta minyak bumi kepada pihak swasta. Untuk menunjang kebijakan investasi tersebut, pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia, khususnya untuk mengeksploitasi sumber daya tambang. Pokok-pokok terpenting dari undang-undang baru tersebut diantaranya : (1) Jaminan bahwa tidak akan ada nasionalisasi aset perusahaan asing, namun bila itu terjadi akan ada kompensasi yang memadai, (2) Jangka waktu operasi perusahaan asing adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang, (3) Pembebasan bea masuk serta pajak untuk periode tertentu dan (4) Jaminan bahwa perusahaan asing dapat memilih sendiri manajemen dan pekerja teknis mereka serta

¹⁶ Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008) Hal 29.

¹⁷ Ganewati Wuryandari (editor), *Politik Luar Negeri Indonesia : Ditengah Pusaran Politik Domestik*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) Hal 113.

dapat pula membawa pulang keuntungan atau modal mereka dengan leluasa ke negara asalnya.¹⁸

Sedangkan menurut Rizal Mallarangeng,¹⁹ dengan keluarnya UU PMA No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintahan Orde Baru telah menempatkan kalangan pengusaha-sekalipun berasal dari luar negeri-tidak lagi dianggap sebagai musuh besar atau kaki tangan imperialisme, tidak seperti kebijakan Orde Lama yang anti modal asing, bahkan pernah melakukan nasionalisasi aset-aset asing pada awal tahun 1960-an, sebaliknya di bawah Orde Baru, para pengusaha asing dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun perekonomian Indonesia. Bahkan, pemerintah Orde Baru memberikan kompensasi berupa kemudahan untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membebaskan para investor untuk menulis kontrak perjanjiannya sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Sadli,²⁰

“Ketika kita mulai mencoba menarik investasi asing tahun 1967, semua jenis investasi dan siapapun investornya dapat diterima. Kita membutuhkan daftar nama dan mata uang dollar untuk jenis investasi yang diinginkan, untuk memberikan kepercayaan kepada peraturan kita. Perusahaan pertambangan yang pertama benar-benar menulis sendiri kontraknya, disebabkan ketiadaan konsep mengenai kontrak pertambangan, kita menerima konsep kontrak yang dibuat oleh perusahaan tersebut sebagai dasar negosiasi dan hanya akal sehat dan hasrat untuk memohon kontrak pertama adalah pedoman kita.”

Dalam konteks sejarah perekonomian Indonesia, UU PMA No.1/1967 ini di nilai sangat liberal, suatu pengungkirbalikan terhadap peraturan investasi sebelumnya masa Orde Lama, yang memungkinkan pemerintah mengambil-alih modal asing demi kepentingan nasional. Menurut Kurtubi,²¹ penguasaan hasil tambang dan mineral oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Amerika Serikat, dimulai dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1967, UU ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan asing menguasai kekayaan bumi Indonesia, bahkan menurutnya kepemilikannya bisa mencapai 100%, UU No. 1 Tahun 1967 tersebut kemudian melahirkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Dalam UU ini, yang paling merugikan kepentingan Indonesia adalah mengenai ketentuan Kontrak Karya (KK) antara pemerintah dengan investor dimana pemerintah tidak dapat begitu saja mengubah perjanjian, misalnya dalam masalah royalti, tanpa persetujuan pihak investor.

2. Korupsi dan Politik Pembangunan.

Pada tahun 1970-an media-media Indonesia gencar memberitakan kasus-kasus korupsi, saat itu kasus yang paling di sorot adalah korupsi seputar Pertamina dan Bulog, tetapi sebenarnya isu korupsi sudah merata dan meluas di berbagai instansi pemerintahan yang lain. Beberapa kasus korupsi diantaranya korupsi yang

¹⁸ Heru Cahyono, *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) Hal 145-146.

¹⁹ Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*. (Jakarta : KPG, 2002) Hal 49.

²⁰ *Ibid* Hal 49.

²¹ Kekayaan Tambang : *Dibodohi Oleh Bangsa Sendiri* (Harian Kompas, Tanggal 2 November 2012).

terjadi di Departemen Agama, korupsi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan CV Haruman, korupsi di Departemen Perhubungan dalam pengadaan kebutuhan perusahaan kereta api, korupsi di Direktorat Bea dan Cukai, korupsi di Departemen Pertanian dan Kehutanan dan kasus-kasus korupsi diberbagai Departemen lainnya, selain itu marak juga berbagai macam penyelewengan dan gaya hidup tidak wajar dari para pejabat tinggi dari level Menteri sampai Bupati, bahkan di Telkom, salah seorang pejabatnya mendepositokan uang perusahaan atas nama pribadi sebesar Rp. 250 juta dan menikmati sendiri bungannya tiap bulan.²²

Selain maraknya budaya korupsi, terhadap juga pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan, misalnya protes terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), proyek swasta yang menghimpun dana sekitar 2,5 juta dollar AS.²³ Proyek TMII merupakan usulan Ibu Tien Soeharto untuk membangun sebuah kompleks hiburan, rekreasi dan kebudayaan yang mirip dengan *Disneyland* di Amerika Serikat atau *Thai-in-Miniature Land* di Muangthai, gagasan Ibu Tien ini dilontarkan secara terbuka di depan forum pertemuan Gubernur se-Indonesia pada bulan Desember 1971, segera saja reaksi penolakan merebak di kalangan teknokrat, cendekiawan dan mahasiswa, karena gagasan tersebut di nilai kontra produktif, di tengah-tengah penderitaan masyarakat, terlebih sebelumnya Presiden Soeharto baru saja mengulang-ulang pernyataan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengutamakan seluruh dana serta usaha untuk pembangunan nasional.²⁴ Menurut Soemitro,²⁵ rencana pembangunan TMII ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan teknokrat dan mahasiswa, gagasan Ibu Tie tersebut dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan negara mengingat biayanya yang terlampau mahal, serta tidak jelas cara memperoleh dananya. Proyek tersebut dianggap terlampau dini direncanakan, sehingga tidak bedanya dengan proyek mercusuar zaman Nasakom, lebih lanjut menurut Soemitro para teknokrat sempat mengirimkan tanda-tanda mereka akan berhenti menyusul pernyataan Ibu Tie, bahwa TMII sudah harus berdiri dengan megah di tahun 1975, terlebih-lebih terakhir diketahui, seluruh Gubernur diperintahkan Mendagri supaya membantu anggaran belanja negara untuk proyek pembangunan TMII dari alokasi anggaran daerah masing-masing.

3. Politik dan Demokrasi.

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan melakukan kooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat, antara lain melalui perundang-undangan. Misalnya melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik dan MPR/DRP/DPRD.²⁶

²² Rum Aly, *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter : Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004) Hal 204.

²³ *Ibid* Hal 81.

²⁴ *Ibid* Hal 166-167.

²⁵ Heru Cahyono, *Ibid* Hal 144.

²⁶ *Ibid* Hal 79.

Undang-Undang Pemilu disahkan oleh DPR-GR di tahun 1969, perundang-undangan tersebut, secara substansi berisi soal jumlah anggota parlemen yang berhak ditunjuk oleh Presiden sebanyak 100 orang dari 460 anggota DPR, dan peserta pemilu tahun 1971 hanya boleh diikuti oleh partai-partai politik yang sudah ada.²⁷

Untuk point terakhir banyak mengundang kekecewaan dari kalangan Islam dan mantan eks-PSI, karena pemerintah Orde Baru menolak melakukan rehabilitasi terhadap Masyumi dan PSI, padahal kelahiran Orde Baru tidak lepas dari keterlibatan dua kelompok ini sebagai kekuatan oposisi yang mampu memobilisasi pemuda dan mahasiswa turun kejalan saat meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Alasan pemerintah Orde Baru menolak rehabilitasi, karena dua partai politik ini dianggap terlibat secara aktif dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Pada bulan Februari 1970 pemerintah mengumumkan bahwa semua pegawai pemerintahan harus setia pada pemerintah Orde Baru, mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar, bahkan para perwira militer dan pejabat-pejabat pemerintahan diturunkan ke desa-desa melakukan intimidasi, untuk menarik suara memenangkan Golkar pada pemilu 1971.²⁸ Pada tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud,²⁹ memutuskan bahwa departemennya akan menjadi tulang punggung kemenangan Golkar, serta menyampaikan bahwa semua pegawai dibawah lingkungannya, apabila ketahuan aktif di salah satu partai politik akan mengalami hambatan dalam kenaikan jabatan.

Pemerintah juga mengeluarkan larangan-larangan dalam kampanye yang sebenarnya sangat membatasi kebebasan partai politik selain Golkar dalam melakukan kegiatan politiknya. Larangan tersebut dijelaskan oleh laksamana Sudomo menjelang kampanye, larangan-larangan tersebut antara lain :

“Dilarang memperdebatkan dasar-dasar Pancasila dan UUD 1945, memfitnah, menghina atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada pemerintah atau pejabat pemerintah, individu, kelompok, organisasi atau negara asing, atau melakukan tindakan/kegiatan yang bertentangan dengan etika/aturan moral yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila”³⁰

Sedangkan empat larangan Sodomo lainnya yaitu, dilarang melakukan intimidasi lawan politik, dilarang mencederai kewibawaan pemerintah dan para pejabatnya, dilarang merusak persatuan nasional serta dilarang mengkritik kebijakan pemerintah. Otomatis pembatasan ini meniadakan segala diskusi masalah substansial dan memberikan jalan kepada pemerintah untuk melakukan segala pembersihan, larangan ini juga menjadi jalan untuk mengambil langkah terhadap apa saja yang dianggap mengancam “keberhasilan” pemilihan umum.³¹

²⁷ Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. (Jakarta : LP3ES, 1984) Hal 76.

²⁸ Jopie Lasut, *Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti Orde Baru: Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Bauri*. (Jakarta : Yayasan Penghayat Keadilan, 2011) Hal 21-22.

²⁹ Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1986) Hal 299-230

³⁰ David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jendral ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2010) Hal 53.

³¹ *Ibid* Hal 53.

Kebijakan kooptasi memenangkan Golkar tersebut, memunculkan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tanggal 28 Mei 1971 menjelang pelaksanaan Pemilu pertama Orde Baru, dideklarasikan gerakan Golput (Golongan Putih), gerakan ini menurut para penggagasnya diakui bukan sebuah organisasi, melainkan sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan. Ketidakpuasan terutama menyangkut diinjak-injaknya demokrasi baik oleh partai politik maupun oleh Golongan Karya. Partai politik dianggap menginjak-nginjak demokrasi karena membuat dan menyepakati UU Pemilu yang tidak demokratis, sementara Golkar dianggap melakukan menginjak-injakan terhadap demokrasi karena berusaha memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat pemerintah (militer dan sipil) serta memakai cara-cara diluar batas aturan permainan dalam ukuran masyarakat demokratis.³²

Para penggagas Golput sendiri mengakui gerakan mereka sebagai gerakan kultural dan bukan gerakan politik atau pengelompokan politik, namun pada praktiknya, golput mau tidak mau harus diidentifikasi sebagai sebuah pengelompokan dan gerakan politik yang bersikap kritis terhadap kinerja negara dan kebijakannya. Golput pada hakikatnya merupakan gerakan protes terhadap rencana dan pelaksanaan Pemilu 1971 dengan tidak mengambil pilihan terhadap salah satu kontestan dari 10 kontestan yang mengikuti Pemilu tersebut. Arief Budiman menyatakan alasan dan tujuan Golput sebagai berikut :

“Dikalangan luas orang-orang muda di Indonesia sudah sejak lama terjadi ketidakpuasan, terutama sejak akhir tahun 1969 dengan diundangkannya UU Pemilu yang tidak demokratis, yang sebenarnya dipaksakan oleh partai politik. UU tersebut antara lain telah mematikan tampilnya kekuatan-kekuatan politik baru dalam Pemilu, selain partai-partai yang sudah ada dan Golkar. Melalui UU itu, ternyata orang-orang partai yang sudah sejak dulu gagal membangun negeri ini kemudian hanya mengambil enaknya saja meninggalkan generasi muda dalam rezim Orde Lama, dengan mengambil posisi masing-masing, kemudian muncul Golkar yang ternyata sangat mengecewakan orang muda dan masyarakat pada umumnya, dimana dibuktikan dalam kampanyenya akhir-akhir ini yang telah menginjak-nginjak hak-hak asasi dan demokrasi rakyat. ABRI ternyata tidak netral, terang-terangan memihak Golkar, sehingga ABRI yang sebenarnya diperlukan sebagai wasit dalam Pemilu telah mengecewakan rakyat”³³

Diantara eksponen gerakan Golput adalah Imam Waluyo, Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Adnan Buyung Nasution, Sumail, Husin Umar, Julius Usman, Asmara Nababan dan Jusuf AR. Terlepas dari keberadaanya yang mengundang pro dan kontra, Golput sebagai sebuah gerakan protes, kemudian meluas melalui berbagai aktifitas politik seperti penyebaran pamflet, diskusi serta aksi turun ke jalan.³⁴

H. Anatomi Gerakan Mahasiswa 1974.

Keberhasilan gerakan mahasiswa 1966 melakukan transformasi politik dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tentunya selain didukung oleh pihak militer

³² Eep Saefulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010). Hal 146.

³³ *Ibid* Hal 147

³⁴ *Ibid* Hal 148

khususnya dari Angkatan Darat (AD), juga karena solidaritas perjuangan yang mereka bangun antar lembaga kemahasiswaan melalui pembentukan satu kesatuan aksi, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI di bentuk pada 25 Oktober 1965 sebagai wadah integrasi kekuatan mahasiswa untuk melancarkan perlawanan terhadap PKI, kesatuan aksi ini menghimpun sejumlah organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GMKI, Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI).³⁵

Puncak perlawanan gerakan mahasiswa 1966 ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno. Dengan runtuhnya Orde Lama serta naiknya Soeharto sebagai presiden menandai pembentukan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Menurut Adi Suryadi Culla,³⁶ peristiwa itu merupakan sebuah pencapaian paling bersejarah gerakan mahasiswa-termasuk KAMI di dalamnya-setelah 26 tahun pasca kemerdekaan. Keberhasilan dalam melakukan perubahan sistem politik ini, menegaskan bahwa mahasiswa mampu mengartikulasi keinginan dan harapan rakyat yang menginginkan perubahan.

Pasca runtuhnya Orde Lama gerakan mahasiswa 1966 dihadapkan pada dua pilihan menjadi kekuatan moral atau politik, kekuatan moral maksudnya mahasiswa hanya muncul sebagai aktor politik ketika krisis sedang mencapai puncaknya, tetapi ketika krisis sudah berlalu, mahasiswa kembali ke kampus menyelesaikan masa studinya, mereka tidak mengharapkan imbalan, apalagi posisi sebagai pejabat dipemerintahan.³⁷ Sedangkan kekuatan politik maksudnya setelah mahasiswa berhasil menggulingkan rezim otoriter, mereka ikut terlibat di dalam struktur-struktur kekuasaan, mereka bisa menjadi pejabat atau anggota parlemen, keikutsertaan dalam lingkaran kekuasaan dipandang lebih realistis dari pada perjuangan di luar pemerintahan.

Pada bulan Januari 1967 ketika Soeharto mengesahkan pengumuman daftar anggota parlemen baru (MPRS dan DPR-GR), ada empat belas nama aktifis mahasiswa yang termasuk di dalamnya, mereka duduk sebagai anggota parlemen mewakili kalangan mahasiswa.³⁸ Kenyataan kemudian muncul, segera setelah penunjukan wakil-wakil mahasiswa untuk duduk di MPRS/DPR-GR, perselisihan antara anggota lembaga-lembaga ekstra kemahasiswaan yang terhimpun di KAMI mulai meletup, kepentingan-kepentingan yang berbenturan antara satu wakil dengan wakil yang lain merebak ke permukaan, para anggota legislatif dari mahasiswa ini tidak mampu bersatu sebagai sebuah kelompok di parlemen,³⁹ masing-masing anggota merapat atau bergabung dengan partai politik, mengingat saat itu hampir semua organisasi mahasiswa ekstra kampus menjadi patron dari partai politik tertentu.

³⁵ Adi Suryadi Culla, *Ibid* Hal 48-49.

³⁶ *Ibid* Hal 63.

³⁷ John Maxwell, *Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2001) Hal 299.

³⁸ *Ibid* Hal 297-298.

³⁹ *Ibid* Hal 301.

Memasuki awal tahun 1969, beberapa organisasi ekstra kampus menyatakan diri keluar dari KAMI, mereka berpendapat KAMI sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai lembaga kemahasiswaan nasional dan tunggal. Sejalan dengan eksodus besar-besaran organisasi mahasiswa meninggalkan KAMI, beberapa organisasi intra kampus sedang menjalin komunikasi internsif antara satu dengan yang lainnya. Di Kota Bandung organisasi intra kampus membentuk Badan Kerja Sama Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa (BKS DM/SM) yang menghimpun 16 perguruan tinggi.⁴⁰ Bersamaan dengan berakhirnya eksistensi KAMI, perkembangan dunia kemahasiswaan menunjukkan perkembangan baru, dimana pengaruh organisasi ekstra kampus mulai memudar dan berangsur-angsur kehilangan popularitas di kalangan mahasiswa generasi baru.

Kemerosotan popularitas organisasi ekstra ini diperkuat oleh keputusan beberapa Dewan Mahasiswa, seperti antara lain di Universitas Padjadjaran, yang melarang adanya wadah-wadah kegiatan organisasi ekstra universitas di kampus mereka, mereka menganggap organisasi-organisasi ekstra tidak mampu menjaga kemurnian gerakan moral, terlalu banyak bermain politik mengejar posisi-posisi strategis di dalam struktur kekuasaan. Sikap radikal DM Unpad ditunjukkan seiring dengan suksesnya Studi Grup Mahasiswa Indonesia, sebuah kelompok studi anti organisasi ekstra kampus yang sebenarnya berafiliasi dengan Gemsos (Partai Sosialis Indonesia), menempatkan kader-kadernya sebagai Ketua Dewan Mahasiswa hampir di seluruh perguruan tinggi di kota Bandung.⁴¹ Generasi mahasiswa awal tahun 1970-an ini memiliki sikap-sikap kritis sendiri yang berbeda dengan angkatan 1966, bahkan dapat diinterpretasikan, sebagai gerakan koreksi yang meluruskan kegagalan senior mereka. Selain itu, generasi ini dapat dikatakan tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan dengan militer, apalagi militer yang mereka lihat secara faktual, dalam sederetan fakta telanjang merupakan pelaku tindakan korupsi dan kolusi.⁴²

Pada periode ini umumnya mahasiswa tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan organisasi ekstra, selain tidak begitu suka dengan kegiatan-kegiatan berbau politik praktis, para mahasiswa tidak bersedia menjalani masa perpeloncoan kedua kalinya, karena umumnya perpeloncoan di organisasi ekstra kampus lebih berat dari pada perpeloncoan ketika waktu pertama kali mereka menjadi mahasiswa.⁴³ Kelahiran generasi ini didukung oleh situasi kondisi yang memperkuat kegiatan mereka di dalam kampus, karena mulai tahun 1967 secara perlahan dan berangsur-angsur mahasiswa mulai disibukan dengan kegiatan perkuliahan yang semakin padat, pagi hingga petang hari. Sehingga tidak mengherankan untuk kegiatan ekstra kurikuler mereka lebih memilih kegiatan dilingkungan kampus. Inilah yang akan mendorong konsolidasi yang akhirnya memperkuat gerakan-gerakan mahasiswa intra kampus pada tahun-tahun berikutnya menggantikan peran organisasi ekstra universitas. Organisasi-organisasi intra kampus pada saat itu menjadikan diri sebagai

⁴⁰ Rum Aly *Ibid* Hal 72

⁴¹ Francois Raillon, *Ibid* Hal 79.

⁴² Rum Aly *Ibid* Hal 73-74.

⁴³ *Ibid* Hal 74.

organisasi yang independen terhadap pengaruh apapun dari luar kampus, mereka betul-betul menjaga identitas diri sebagai *student government*.⁴⁴ Generasi ini lebih fokus pada gerakan perlawanan melalui cara-cara ekstra parlementer terhadap korupsi dan sikap anti demokrasi dari kalangan penguasa.

Kemunculan gerakan independen atau anti ormas, sebenarnya sudah lama bergaung jauh-jauh hari di Universitas Indonesia (UI), khususnya di fakultas sastra dan psikologi, bahkan kelahirannya bersamaan dengan kuatnya politik aliran pada masa Orde Lama. Kelompok ini melakukan penolakan atas kehadiran organisasi ekstra, disebabkan organisasi-organisasi ekstra selalu memperebutkan posisi di Senat Mahasiswa (SM) yang merupakan organisasi intra kampus di tingkat fakultas. Setelah mereka menduduki posisi di SM, kelompok ekstra biasanya selalu memaksakan kehendak dan cara berpikir kepada para mahasiswa, terlebih pola pikir yang mereka tanamkan, berdasarkan pesanan sang sponsor, yaitu partai politik yang menjadi patronnya.⁴⁵ Keterangan A. Dahana di bawah ini membenarkan bahwa fakultas sastra dan psikologi menjadi benteng terakhir gerakan pemurnian kampus dari organisasi ekstra di UI.

“Setiap partai politik punya perwakilan baik di tingkat universitas maupun fakultas, bahkan sampai jurusan. Dinding-dinding Universitas Indonesia di Jalan Salemba IV dan fakultas lain (rawamangun) dipenuhi papan pengumuman organisasi mahasiswa yang berinduk di luar kampus, namun ditengah suasana yang begitu mencekam, ada dua fakultas yang tidak didominasi oleh organisasi ekstra. Itulah Fakultas Sastra dan Psikologi UI. Senat mahasiswa di kedua fakultas itu selalu bekerja sama mempertahankan independensi gerakan mahasiswa sebagai organisasi intra, kami selalu menyebut kedua fakultas itu sebagai pulau yang mampu bertahan”⁴⁶

Dengan surutnya peran organisasi ekstra kampus, otomatis peran beralih kepada mahasiswa intra kampus dalam melancarkan gerakan-gerakan kritik terhadap kekuasaan, peran organisasi intra kampus yang paling menonjol tampak pada kampus-kampus di Bandung, terutama di tiga perguruan tinggi terkemuka yakni Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran dan Universitas Parahyangan, di motori oleh Dewan Mahasiswa, ketiga kampus ini tampil menjadi kekuatan politik baru pasca meredupnya KAMI.⁴⁷

Menurut John Maxwell,⁴⁸ di Jakarta meskipun ormas-ormas ekstra senantiasa mempunyai peran dilembaga intra di beberapa perguruan tinggi, di kampus UI terdapat tiga fakultas yang menolak kehadiran organisasi ekstra, yaitu sastra, psikologi dan kedokteran gigi. Ketiga fakultas ini sering di sebut sebagai kelompok mahasiswa independen, mereka menginginkan pembersihan terhadap kekuatan-kekuatan politik eksternal yang menggerogoti kehidupan kampus, mereka

⁴⁴ *Ibid* Hal 139.

⁴⁵ Rudi Badil, Luki Sutrisno Bekt, Nesy Luntungan (editor). *Soek Hok-Gie Sekali Lagi*. (Jakarta : KPG, 2010) Hal 189-190.

⁴⁶ A. Dahana, *Bung Sjahrir Yang Saya Kenal* dalam Rudy Badil dan Masmimar Mangiang (editor), *Ciil* (Jakarta : KPG, 2010) Hal 46.

⁴⁷ Rum Aly, *Ibid* Hal 46.

⁴⁸ John Maxwell Hal 303-305.

menginginkan pemulihan kebebasan akademik sepenuhnya, karena mereka percaya kondisi semacam itu sangat penting, agar para mahasiswa dan intelektual mampu menyatakan pendapatnya secara terbuka, tanpa takut dikenai tuduhan tertentu. Pada tanggal 3 Juli 1968 di Jakarta para aktifis mahasiswa independen mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Grup Diskusi Universitas Indonesia (GD-UI),⁴⁹ kelompok diskusi ini selain bertahan cukup lama, peran mereka di nilai cukup penting dalam mewarnai perkembangan gerakan mahasiswa era tahun 1970-an. Grup Diskusi Universitas Indonesia (GD-UI) didirikan oleh berbagai kalangan dari latar belakang berbeda, mereka dipersatukan oleh pandangan, bahwa reputasi universitas sedang dipertaruhkan akibat ulah para pemimpin mahasiswa yang menempatkan kepentingan kelompok yang sempit. Kelompok ini berpandangan mengenai pentingnya melindungi dan memperkuat universitas, sebagai benteng kegiatan intelektual yang kuat dan independen, mereka menolak setiap upaya campur tangan pihak luar dalam persoalan mahasiswa dan universitas.⁵⁰ Kelompok GD-UI ini merupakan tempat pertemuan intelektual, laboratorium gagasan, pemikiran tentang perubahan sosial dan persemaian ide-ide modernisasi. GD-UI memiliki anggota 100 orang, dengan membuka pendaftaran 30 orang setiap tahun, dalam perjalanannya kelompok ini sering dikait-kaitan dengan mantan eksponen Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Menurut Juwono Sudarsono,⁵¹ ada dua alasan kenapa GD-UI dilihat oleh publik sebagai organisasi di bawah kendali PSI. *Pertama*, kesamaan nama antara Sjahrir, pendiri GD-UI dengan Sutan Sjahrir, pendiri PSI. *Kedua*, persamaan cara GD-UI dengan PSI dalam merekrut anggotanya, memberikan pilihan pada kualitas, bukan kuantitas anggota. Lebih jauh, banyak anggota GD-UI bukan berasal dari partai politik atau ormas tertentu, serta umumnya berasal dari keluarga-keluarga kaya dan mapan. Berbeda dengan pernyataan diatas, menurut Jopie Lasut,⁵² gerakan independen sangat identik dengan PSI, bahkan Francois Raillon,⁵³ menjelaskan gerakan mahasiswa independen periode tahun 1970-an, khususnya di kota Bandung merasa terikat secara langsung ataupun tidak dengan PSI. Pengaruh PSI memang dirasakan sangat kuat, walaupun partai bentukan Sutan Sjahrir tersebut sudah lama dibubarkan oleh Soekarno, tidak lantas memberangus kiprah politik para kader-kadernya, banyak para anggotanya tetap menjadi pengkritik dan membangun jaringan perlawanan bawah tanah.

Menurut J.D Legge,⁵⁴ setelah PSI dibubarkan oleh Soekarno, karena dinilai terlibat dalam pemberontakan PRI/Pemersta, kader-kader partai ini masih solid membangun jaringan dan komunikasi antara mereka. Eks-PSI ini sering bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutahir, sehingga mengundang minat banyak anak muda untuk turut aktif dalam diskusi-diskusi mereka. Pada awal konsolidasi

⁴⁹ Francois Raillon, *Ibid* Hal 72.

⁵⁰ John Maxwell, *Ibid* Hal 306.

⁵¹ Van Dijk, *Pengadilan Hariman Siregar*. (Yogyakarta : Teplok Press, 2000) Hal 12-14.

⁵² Jopie Lasut, *Ibid* Hal 7

⁵³ Francois Raillon, *Ibid* Hal 165.

⁵⁴ J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993)

rezim orde baru tahun 1966 ada upaya merehabilitasi kembali PSI, tapi akhirnya upaya politik itu tidak terlaksana, sehingga muncul pemikiran di kalangan eks-PSI untuk merintis gerakan baru yang tidak berdasarkan motif ideologis, tapi berlandaskan program yang riil, gerakan ini kemudian dikenal dengan *independent group*.

Gerakan mahasiswa 1974 tidak bisa dilepaskan dari sosok Hariman Siregar. Hariman Siregar lahir di Padang Sidempuan sebuah kota kecil di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 1 Mei 1950, ia dilahirkan sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara, ia menjadi anak tengah pasangan Kalisati Siregar dan Anibarsah Hutagalung. Ayahnya yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jawatan Perdagangan mengharuskan sang ayah berpindah-pindah tugas dari suatu daerah ke daerah lain.⁵⁵

Hariman mulai belajar memahami persoalan-persoalan politik langsung dari kedua orang tuanya, kebetulan afiliasi politik orang tuannya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI), bahkan ibunya aktif di Gerakan Wanita Sosialis, salah satu *onderbouw* PSI.

“Sejak kecil gue sudah memperoleh stereotype bahwa PSI itu baik, sementara PKI tidak beragama. Dan Presiden Soekarno runtuh oleh dirinya sendiri, saat itu, memang gue mendapat kesan keluarga kami anti-Soekarno, bahkan, di rumah kami tak ada gambar Soekarno satu pun, sebagaimana banyak terdapat di rumah-rumah orang Indonesia lainnya”⁵⁶

Karena itu tidak mengherankan jika kemudian pergaulan politik Hariman setelah menjadi aktifis mahasiswa, umumnya berasal dari kalangan simpatisan PSI, bahkan mentor politiknya adalah Prof. DR. Sarbini Soemawinata salah satu tokoh PSI, yang kebetulan mertuanya sendiri, dengannya Hariman sering bertukar pikiran mengenai soal-soal ekonomi dan politik. Pertengahan tahun 1973, salah satu agenda penting mahasiswa UI adalah pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa, Hariman Siregar berkeinginan maju sebagai salah satu kandidat. Menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UI di masa itu, merupakan hal yang cukup sulit, karena dalam sejarahnya Ketua Dewan Mahasiswa UI harus memiliki basis organisasi mahasiswa ekstra kampus, seperti HMI, GMNI atau PMKRI. Akan halnya Hariman ia tidak terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut, ia hanya aktif di GD-UI sebuah kelompok diskusi dengan anggota tidak lebih dari sekitar 200-300 orang.⁵⁷ Saat pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman memperoleh kemenangan tipis dari Ismeth Abdullah dari HMI dengan selisih suara 26 : 24, tentu kemenangan Hariman ini mengejutkan kalangan mahasiswa UI, karena diatas kertas seharusnya kandidat dari HMI memenangkan pemilihan. Tidak lama setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar dilantik oleh Pejabat Rektor UI, Prof. Dr. R. Slamet Imam Santoso pada awal Agustus 1973, kurang dari sebulan setelah pelantikan, DM UI langsung disibukan dengan berbagai aktivitas protes terhadap rezim Orde Baru.⁵⁸ Setelah pelantikan Hariman menjalin kontak dengan berbagai pihak, baik ke sesama

⁵⁵ Amir Husain Daulay, dan Imran (editor). Ibid Hal 18.

⁵⁶ Ibid Hal 19.

⁵⁷ Ibid Hal 33-34.

⁵⁸ Ibid Hal 37.

dewan mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi lain, maupun ke unsur-unsur non kampus. Aksi demonstrasi pra Malari mencapai puncaknya ketika DM UI melakukan malam keprihatinan saat pergantian tahun pada tanggal 31 Desember 1973, pada malam itu berkumpul dosen, pelajar dan perwakilan dewan mahasiswa dari Bandung, Jakarta dan Bogor. Mereka berkumpul untuk mendengarkan orasi Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar yang akan menyampaikan pidato berjudul “Pernyataan Diri Mahasiswa”. Berikut kutipan orasi dari Hariman Siregar pada malam itu :

“Setelah secara moral dan konstitusional Jendral Soeharto menjadi Presiden di negeri ini, pembangunan ekonomi telah dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan mitos baru yang banyak menimbulkan harapan..dan jelaslah betapa bantuan luar negeri dan modal asing merupakan faktor pokok dalam perekonomian negara dan bukanlah faktor pelengkap sebagaimana sering kali dikemukakan oleh para pejabat..persoalannya terletak kepada kait-mengkaitnya dari elit penguasa dalam kekuasaan dengan kepentingan ekonomi. Ini semua bakal menjadi suatu gejala yang membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara”

Di awal Januari 1974 suhu politik nasional semakin memanas, para mahasiswa terus menggelar berbagai aksi. Tanggal 10 Januari 1974 di deklarasikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) baru yang berisi : pembubaran Dwifungsi ABRI, penurunan harga-harga dan pemberantasan korupsi, dua hari kemudian mahasiswa yang diorganisir oleh DM UKI membakar patung-patung replika Sudjono Hoemardani, Ali Moertopo, Tanaka dan Widodo Budidarmo. Aksi-aksi ini merupakan pemanasan untuk menyambut kunjungan Tanaka ke Indonesia 14-16 Januari 1974.⁵⁹

Pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi aksi demonstrasi besar-besar di Jakarta, aksi di mulai dari kampus UI Salemba, para mahasiswa yang berjumlah 1.500 orang berkumpul meneriakkan yel-yel anti modal asing dan anti Aspri, mereka membawa poster-poster yang antara lain berbunyi “tolak dominasi ekonomi Jepang”, “ganyang antek-antek kolonialis Jepang” dan “turunkan harga”. Mereka kemudian mengadakan *long march* ke Universitas Trisakti, sepanjang jalan mahasiswa menurunkan bendera Jepang dan menurunkan bendera merah putih setengah tiang. Namun, ketika mahasiswa berjalan mendekati monas, jumlah massa semakin besar, karena berbaurnya kalangan pelajar dan masyarakat dalam barisan mahasiswa.⁶⁰ Semakin siang jumlah massa yang terlibat aksi demonstrasi semakin banyak, karena hampir di setiap sudut jalan, massa yang terdiri dari masyarakat umum yang bergelombol masuk ke dalam barisan demonstran.

Pasukan bersenjata dari berbagai kesatuan telah menjaga dengan ketat jalan menuju Monas dan Istana, salah satu rombongan yang dipimpin Jopie Lasut dari kalangan non kampus, mengajak mahasiswa untuk maju menerobos Istana, namun permintaan itu ditolak oleh Gurmilar Kartasasmita dari DM UI, akhirnya rombongan mahasiswa dan pelajar itu berputar menuju Tanah Abang, selama dalam perjalanan rombongan massa kian membesar, karena terus bergabungnya rombongan-rombongan lain, sehingga jumlahnya menjadi ribuan orang dalam barisan yang amat

⁵⁹ *Ibid* Hal 61-62.

⁶⁰ Adi Suryadi Culla, *Ibid* Hal 87.

panjang.⁶¹ Menurut Rum Aly,⁶² ada hal penting yang perlu di catat, bahwa terdapat dua rombongan yang tidak terdaftar dalam rencana sebelumnya yang turut bergabung dalam barisan pelajar dan mahasiswa, salah satunya dipimpin oleh Muhammad Muas, mantan aktifis pelajar yang dekat dengan kelompok Tanah Abang III, kelompok ini diketahui tidak sampai di kampus Trisakti, titik akhir tempat berkumpulnya para demonstran, ini berarti barisan Muas pergi ke tujuan dan suatu kegiatan lain.

Ketika barisan demonstran telah berkumpul di Trisakti, untuk melakukan apel bersama, di tempat lain, di depan PT. Astra ratusan pelajar dan pemuda mulai melakukan aksi menjungkirbalikan dan membakar berbagai kendaraan buatan Jepang, sedangkan para Mahasiswa dan Pelajar yang selesai melakukan apel di kampus Trisakti, langsung menarik diri dan kembali ke kampus masing-masing. Akan tetapi aksi kerusuhan itu terus menyebar ke berbagai penjuru Ibu Kota, keadaan tidak terkendali, kerusuhan tersebut terjadi sampai larut malam. Peristiwa yang kemudian di kenal dengan Malari itu telah menelan korban 11 nyawa, 17 luka berat dan 120 luka ringan, dengan 807 mobil, 187 motor, 144 bangunan yang di bakar massa, serta 164 kg emas dijarah.⁶³

Keesokan harinya sepuluh dewan mahasiswa di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa aksi-aksi pengrusakan, pembakaran yang terjadi merupakan bentuk-bentuk sifat destruktif dan menjurus tindak anarki yang merupakan perbuatan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan perjuangan mahasiswa. Menurut Hariman Siregar Ketua DM UI aspirasi mahasiswa sudah jelas serta bisa dibedakan dengan tindakan kerusuhan, para mahasiswa justru ikut berusaha untuk membantu menertibkan keadaan.⁶⁴

I. Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Orde Baru.

Setelah peristiwa Malari pemerintah Orde Baru mengeluarkan SK. No. 028/U/1974 yang intinya berisi tentang petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi, kebijakan ini pada hakekatnya merupakan sebuah usaha sistematis yang hendak dilakukan pemerintah dalam usaha pembatasan aktifitas politik mahasiswa.⁶⁵ Selain itu pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan terhadap pemimpin mahasiswa dan tokoh masyarakat yang kritis terhadap kebijakan strategi pembangunan, diantaranya seperti Hariman Siregar, Prof. Sarbini Sumawinata, Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Princen. Pemerintah Orde Baru juga melakukan pembredelan terhadap beberapa media massa: Harian Nusantara, Harian Kami, Indonesia Raya, Abadi, Pedoman, Suluh Berita dan Mahasiswa Indonesia.⁶⁶

Namun, pada saat yang sama, berbagai tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang lebih nasionalis, ternyata diterima dan dilaksanakan

⁶¹ Rum Aly, *Ibid* Hal 364.

⁶² *Ibid* Hal 364

⁶³ Adi Suryadi Culla, *Ibid* Hal 88.

⁶⁴ *Dewan-dewan mahasiswa dan berbagai organisasi mencela pengrusakan-pengrusakan dan pembakaran.* (Harian Kompas, tanggal 16 Januari 1974).

⁶⁵ Adi Suryadi Culla, *Ibid* Hal 93.

⁶⁶ Eep Saefullah Fatah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru* *Ibid* Hal 196.

oleh Soeharto.⁶⁷ Pasca Malari strategi kebijakan ekonomi Orde Baru bergeser dari pasar terbuka, menjadi kebijakan sentralisme oleh negara, selain itu pemerintah mengubah prioritas kredit dengan meningkatkan bantuan untuk perusahaan-perusahaan beskala kecil yang dimiliki oleh kalangan pribumi, dari 34 persen menjadi 58 persen. Pemerintah Orde Baru juga meluncurkan dua program kredit yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia, yaitu Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dua program kredit tersebut memberikan pinjaman modal bagi para pengusaha pribumi, sedangkan pengusaha keturunan tionghoa sama sekali tidak di perbolehkan mengambil kedua kredit tersebut.⁶⁸ Selain itu, pada tanggal 22 Januari 1974 Dewan Stabilitas Ekonomi, suatu lembaga supra kabinet yang dipimpin oleh Soeharto sendiri, mengumumkan bahwa kebijakan penanaman modal asing akan diubah dengan program yang lebih Indonesiasasi dalam dunia investasi. Dengan keputusan semua penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk *joint venture*, dimana paling sedikit 51 persen saham harus dimiliki oleh pihak Indonesia, dan dari jumlah saham itu paling tidak setengahnya harus dimiliki oleh kaum pribumi.⁶⁹ Diterapkan pula kebijakan di sektor lapangan kerja yang pro pribumi dengan mengenakan pajak 100 dollar Amerika perbulan, terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing lebih dari satu tahun. Pajak tersebut sebagian besar digunakan untuk melatih tenaga kerja Indonesia supaya menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai persiapan untuk menggantikan tenaga asing tersebut bila saatnya tiba.⁷⁰

J. Penutup.

Kasus gerakan mahasiswa 1974 mampu membongkar asumsi para ilmuwan politik tentang mekanisme kerja sistem politik yang diteorikan David Easton, bahwa mekanisme kerja sistem politik di negara dunia ketiga umumnya otoriter, kebijakan (output) dari sistem politik tidak melibatkan masukan (input) dari para anggota sistem politik (masyarakat), tetapi oleh sistem politik (pemerintah) yang dominan. Untuk kasus gerakan mahasiswa 1974 pemerintah Orde Baru justru merespon tuntutan mahasiswa, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan pembangunan yang lebih mendukung pihak swasta (pengusaha) pribumi.

K. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aly, Rum. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter : Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004)
- Bekti, Rudi Badil, Nesy Luntungan , Luki Sutrisno (editor). *Soek Hok-Gie Sekali Lagi*. (Jakarta : KPG, 2010)
- Culla, Adi Suryadi. *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

⁶⁷ Rizal Malarangeng, *Ibid* Hal 83.

⁶⁸ *Ibid* Hal 84.

⁶⁹ *Ibid* Hal 88.

⁷⁰ *Ibid* Hal 88.

- Cahyono, Heru. *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998).
- Daulay, Amir Husain dan Imran Hasibuan (editor), *Hariman dan Malari : Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. (Jakarta : Q. Communication, 2011).
- Crouch, Harold. *Militer Dan Politik Di Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1986)
- Dijk, Van. *Pengadilan Hariman Siregar*. (Yogyakarta : Teplok Press, 2000)
- Fattah, Eep Saefulloh, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010).
- Fadhly, Fahrurrazman (editor), *Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1999*. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. *Revolusi Politik Kaum Muda*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Jenkins, David. *Soeharto dan Barisan Jendral ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2010)
- J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993)
- Lasut, Jopie. *Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti ORBA: Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Bauu*. (Jakarta : Yayasan Penghayat Keadilan, 2011).
- Mirsel, Robert. *Teori Pergerakan Sosial*. (Yogyakarta : Resist Book, 2004).
- MacAndrews, Mohtar Mas'oe dan Colin. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008)
- Mangiang, Rudy Badil dan Masmimar. (editor), *Ciil* (Jakarta : KPG, 2010)
- Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*. (Jakarta : KPG, 2002).
- Maxwell, John. *Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001)
- Natrsir, Aswab Mahasin dan Ismed. *Cendekiawan dan Politik*. (Jakarta : LP3ES, 1983).
- Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. (Jakarta : LP3ES, 1984)
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010).
- Singh, Rajendra. *Gerakan Sosial Baru*. (Yogyakarta : Resit Book, 2010)
- Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996)
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi*. (Yogyakarta : Jalasutra, 2009)
- Wuryandari, Ganewati. (editor), *Politik Luar Negeri Indonesia : Ditengah Pusaran Politik Domestik*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)